

# Perspektif Liberalisme dalam Analisis Kepentingan Nasional Jepang pada ASEAN+3

Palupi Anggraheni<sup>1</sup>, Cakra Diaz Pratama<sup>1</sup>, Mohammad Daffa Izulhaq<sup>1</sup>, Gogo Mikhael Sitompul<sup>1</sup>, Raditya Abdurrahman Nugraha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: palupi.anggraheni.hubint@upnjatim.ac.id

## Abstrak

Jepang memiliki sejarah yang Panjang dalam posisi geopolitik di Kawasan Asia Timur, baik dari sudut pandang ekonomi maupun keamanan. Berdasarkan aspek historis Jepang sudah menjadi kekuatan unggul di Asia Timur, namun pada perkembangan politik kontemporer saat ini posisi Jepang mendapatkan tantangan dari negara kompetitornya, termasuk Tiongkok. Perubahan okonstelasi politik luar negeri di Kawasan Asia Timur mendorong Jepang untuk lebih adaptif, termasuk menjajakikerjasama dengan organisasi regiona di Kawasan sekitarnya terasuk ASEAN. Platform kerjasama ASEAN+3 mewadahi Kerjasama ASEAN dengan beberapa negara strategis di Kawasan Asia Timur. Artikel ini berfokus untuk mendeskripsikan kepentingan nasional Jepang yang mendasari negara tersebut untuk bergabung dalam ASEAN+3, termasuk kemungkinan untuk meningkatkan posisi tawar geopolitik dari Tiongkok, sekaligus memperkuat pasar domestic yang mengalami stagnansi ekonom sejak krisis 1997. Perspektif Liberalisme Institusional digunakan untuk melihat motif bergabungnya Jepang dalam ASEAN+3

Kata Kunci: Jepang, ASEAN+3, Kepentingan Nasional

## Latar Belakang

Sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang, Jepang telah menjadi salah satu kekuatan yang paling berpengaruh di Asia. *Power* yang dimiliki aktor politik ini bervariasi pada berbagai periode di sejarah. Salah satunya adalah pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Pasca perang ini, Jepang berubah dari *expansionist military power* menjadi *civilian economic power*. Walaupun perubahan ini ada, relevansi Jepang di politik internasional Asia tidak berkurang secara substansial, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Wilayah ini menempati posisi yang unik dalam hubungannya dengan Jepang. Wilayah yang pada masa Perang Dunia Kedua menjadi tujuan ekspansi militer berdarah, setelah perang menjadi rekan yang cukup unik, terlebih lagi dalam konteks Perang Dingin dan sejak berdirinya ASEAN pada 1967. Hubungan kedua aktor politik ini mengalami dinamika yang unik pada masa *post-war* ini. Misalnya walaupun Jepang menjadi rekan ekonomi yang sangat kontributif terhadap perekonomian Asia Tenggara, sentimen anti-Jepang masih ada di wilayah tersebut karena sejarah agresi pada Perang Dunia Kedua.

Di era kontemporer saat ini, terdapat beberapa faktor yang mendasari urgensi Jepang mengubah dasar pemikiran tradisionalnya terkait politik dan kerjasama dengan ASEAN. Faktor pertama ialah meningkatnya peran Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan negara anggota ASEAN, yang termasuk di dalamnya perjanjian penawaran terkait perdagangan bebas. Faktor kedua adalah munculnya isu keamanan nasional non tradisional yang berkaitan dengan keamanan manusia yakni migran ilegal, pengungsi, terorisme bahkan degradasi lingkungan. Jepang dan negara anggota ASEAN perlu berbagi informasi mengenai isu ini dan segera melakukan tindakan bersama. Dalam prosesnya hal ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk terciptanya kerjasama Jepang dan negara anggota ASEAN. Dengan tujuan perdamaian dan keamanan Jepang dan ASEAN harus bekerjasama di tingkat bilateral, regional dan global. Jepang telah bertahun-tahun memberikan bantuan pembangunan ke

negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan dan mempercepat laju pembangunan yang berkontribusi pada stabilitas politik Asia Tenggara (Masashi, 2003).

Salah satu titik baru hubungan antara Jepang dengan ASEAN beserta Tiongkok adalah berdirinya ASEAN+3 pada 1997. Rezim regional ini lahir dari keadaan yang unik pada politik ekonomi internasional Asia. Pada tahun 1997 Perdana Menteri Jepang Ryutaro Hashimoto datang mengunjungi beberapa negara di ASEAN sambil membawa gagasannya yang membayangkan Jepang-ASEAN memiliki hubungan yang lebih luas lagi. Krisis yang melanda Asia termasuk dampaknya ke Asia Tenggara di tahun 1997 membuat Jepang bereaksi atas peran apa yang dapat Jepang mainkan. Pertama adalah reaksi konvensional dengan menawarkan bantuan *bailout* seperti yang IMF. Kedua adalah rencana penciptaan *Asian Monetary Fund* (AMF) dengan bantuan sebesar \$100 miliar dengan anggota Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Thailand tanpa hadirnya AS serta IMF. Namun AMF tenggelam pada November 1997 karena terdapat pertentangan AS dan tidak adanya peran IMF di dalamnya (Miguel, 2013).

Setahun berselang Menteri Keuangan Jepang Kiichi Miyazawa mengeluarkan terobosan yang disebut Inisiatif Miyazawa yang membuat Jepang mengeluarkan dana sebesar \$30 miliar yang dipakai untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara-negara Asia. Hal ini dilakukan Jepang sebagai upaya memulihkan peran sebagai pemimpin yang mencoba mengatasi krisis yang terjadi (Miguel, 2013). Pada Desember 1997 KTT Jepang-ASEAN untuk pertama kalinya diadakan untuk mewujudkan hubungan baru terkait masalah lingkungan, energi, terorisme internasional, kesehatan, kesejahteraan dan masalah keamanan regional yang ditinjau dan disepakati dalam forum internasional. KTT ini juga diikuti oleh negara Kawasan Asia Timur lainnya seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Hubungan negara anggota ASEAN dan tiga negara Asia Timur dinamai ASEAN+3 dan dilembagakan secara resmi pada KTT ketiga November 1999 di Manila (Miguel, 2013).

Dengan demikian, secara teknis, Jepang menjadi anggota dari rezim regional yang sama dengan Tiongkok, negara yang bisa dikatakan sebagai rival Jepang sebagai "rekan dagang utama negara-negara ASEAN". Akumulasi berbagai hal ini membuat kita berpikir, bagaimanakah hubungan antara Jepang dengan ASEAN+3 jika dalam konteks hubungan ekonomi, yang notabenehnya perekat fundamental Jepang dengan Asia Tenggara sekaligus lahan kontestasi Jepang dengan Tiongkok.

### **Studi Literatur**

Pendekatan kepentingan nasional dalam pendekatan liberal, telah banyak dianalisis dalam berbagai kesempatan. Penelitian Moravcsik & Vachudova (2003) menjelaskan bahwa perdagangan bebas dan penghapusan hambatan perdagangan adalah inti dari teori interdependensi modern, yang menjadi prinsip kepentingan nasional liberal. Kebangkitan integrasi ekonomi regional di Eropa, misalnya, diilhami oleh keyakinan bahwa konflik antar negara akan berkurang dengan menciptakan kepentingan, dalam perdagangan dan kerjasama ekonomi di antara anggota wilayah geografis yang sama. Hal ini akan mendorong negara-negara yang secara tradisional menyelesaikan perbedaan mereka secara militer, seperti Prancis dan Jerman, untuk bekerja sama dalam kerangka ekonomi dan politik yang disepakati bersama sebagai keuntungan mereka. Negara kemudian akan memiliki common interest di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian mereka akan dipaksa untuk tidak berpikir sempit tentang kerangka kepentingan nasional, dan dapat memahami lebih dalam tentang manfaat dari kepentingan regional. Uni Eropa adalah contoh terbaik dari integrasi ekonomi melahirkan kerjasama ekonomi dan politik, yang erat di satu wilayah.

Studi literatur selanjutnya, Rijal (2018) yang melakukan penelitian pada Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi *ASEAN Maritime Forum* (AMF). Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pembentukan AMF sebagai kerangka kerja sama ASEAN terkait isu dan masalah maritim tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia. Indonesia adalah negara dominan di kawasan dalam hal laut, sehingga kebijakan Indonesia di tataran regional tidak dapat dilepaskan pula dari aspek kelautan. Dalam hal ini kepentingan Indonesia dalam

mengajukan pembentukan AMF didasarkan pada, pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar bukan hanya di kawasan tetapi juga di dunia. Identitas fisik tersebut tidak terlepas pula dari sejarah kejayaan maritim di masa lalu. Hadirnya AMF kemudian menjadi penegasan tentang kepentingan Indonesia berkaitan dengan identitasnya sebagai *Archipelagic State*.

### Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, kelompok kami akan membahas implementasi dari kepentingan nasional liberal, untuk memahami peran negara Jepang pada organisasi regional ASEAN+3. Lebih lanjut, kelompok kami menggunakan *level of analysis international system* pada penelitian kami, dengan teori kepentingan nasional melalui pendekatan liberal. Kepentingan nasional memiliki hubungan dengan tujuan kebijakan luar negeri bagi negara-bangsa. Hal-hal yang mengacu dari kepentingan nasional terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, sumber daya, ukuran populasi dan etnis (Burchill, 2005). Kepentingan ini didasarkan pada interpretasi dan tunduk pada perubahan ketika pemerintah sendiri berubah. melalui konsep kepentingan nasional kebijakan pembuat memahami tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian, hal ini dalam praktiknya membentuk dasar untuk tindakan negara. Selain itu, kepentingan nasional berfungsi sebagai perangkat retorik yang melalui dukungan oleh legitimasi dan politik, untuk tindakan yang dihasilkan oleh negara. Kepentingan nasional memiliki kekuatan yang cukup besar karena dapat membantu melegitimasi tindakan yang diambil oleh negara.

Kepentingan nasional liberal memiliki prinsip dasar bahwa kepentingan merupakan akumulasi kepentingan pribadi masing-masing individu yang mendorong keadaan alami, yang dihasilkan tanpa pikiran sadar atau perencanaan (Burchill, 2005). Konsepsi tentang kepentingan nasional berkisar pada beberapa simbiosis tertentu seperti kepentingan masyarakat. Hal tersebut mempertahankan bahwa kepentingan tertinggi adalah kepentingan individu. Gagasan tersebut diekstrapolasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan hubungan antar negara atas dasar perdagangan bebas, dan prinsip non-intervensi oleh negara dalam hubungan komersial antar individu di seluruh dunia. Menurut prinsip dasar *laissez faire*, sering disebutkan bahwa pasar bebas, tidak hanya meningkatkan kemakmuran masyarakat, dengan memungkinkan mereka untuk mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa campur tangan (Burchill, 2005). Gagasan itu juga mempromosikan perdamaian antar negara karena perdagangan bebas adalah penawar yang kuat untuk perang memperebutkan persaingan komersial, kecurigaan dan persaingan untuk komoditas asal negara koloni. Terdapat prinsip yang kuat terhadap filsafat liberal bahwa, hubungan ekonomi antara masyarakat adalah satu kesatuan dan kekuatan perdamaian dalam politik internasional.

Perdagangan bebas, dapat dikatakan adalah cara yang lebih damai untuk mencapai kepentingan nasional. Sebab setiap aktivitas ekonomi akan lebih baik diakumulasikan secara materi bersama bagian dari entitas rezim internasional, daripada jika sebelumnya suatu negara mengejar nasionalisme (Burchill, 2005). Dengan konsekuensi bahwa perdagangan juga akan mematahkan kecurigaan dan perpecahan antar negara, untuk menyatukan individu di mana pun keberadaan mereka dalam satu komunitas. Hambatan buatan yang digunakan untuk membatasi perdagangan, mendistorsi persepsi dan hubungan antar individu, sehingga menyebabkan adanya ketegangan internasional. Perdagangan bebas akan memperluas jangkauan kontak dan tingkat pemahaman antara orang-orang di dunia dan mendorong persahabatan internasional, pemikiran kosmopolitan dan pemahaman. Sehingga, aktivitas perdagangan tanpa hambatan antara masyarakat dunia akan menyatukan mereka dalam suatu komunitas bersama secara damai.

### Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan pembahasan teoritis sebelumnya, bisa kita ketahui lebih lanjut terkait hubungan Jepang dengan ASEAN+3. Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Nominalnya, dan setidaknya sejak 1970-an telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian

regional Asia Tenggara. Dalam penelitian ini kami mencoba menganalisis hubungan antara kedua aktor politik internasional dari sudut pandang kepentingan nasional menurut pemikiran liberal. Kami akan memulai analisis dengan menjelaskan sejarah kemunculan ASEAN+3 dari sudut pandang kepentingan nasional liberal. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan berbagai hal yang diperoleh Jepang dari *arrangement* tersebut.

### **Analisis Studi Kasus**

Berdasarkan metodologi yang telah dibahas, *level of analysis international system* pada penelitian kami menggunakan teori kepentingan nasional melalui pendekatan liberal. Jepang merupakan negara yang telah bertransformasi dari ambisi imperialisme akut di masa lampau, menjadi negara dengan tingkat kemajuan pesat di tahun 1970-an berkat reformasi konstitusi dan pemerintahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca kekalahan perang. Kepentingan nasional berhubungan dengan tujuan kebijakan luar negeri bagi suatu negara. Bagi Jepang, ketiadaan dan larangan kepemilikan pasukan militer yang kuat menjadi tantangan keamanan tersendiri di kawasan dengan atmosfer animositas yang tinggi. Namun, kawasan tersebut tidak hanya berkompetisi dalam hal keamanan, melainkan pula kekuatan ekonomi. Sewaktu Jepang dilanda fenomena *lost decade* atau dekade yang hilang, berbagai negara di kawasan berebut porsi untuk menggantikan posisi Jepang terdahulu sebagai pabrik elektronik dunia. Selain itu, dari faktor-faktor kepentingan nasional seperti geografi, sejarah, sumber daya, ukuran populasi dan etnis, Jepang memiliki kekhawatiran akan kelangkaan sumber daya dan demografi populasi yang semakin mengecil.

Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat menghendaki Jepang untuk menulis ulang konstitusi dan tatanan pemerintahan menjadi suatu sistem yang lebih kondusif dalam menjalankan demokrasi. Perubahan tersebut, dikombinasikan dengan keunggulan keadaan sosio-ekonomi Jepang pasca perang, memungkinkan Jepang menjadi pabrik dunia berkat kebijakan ekonomi yang akomodatif akan pertumbuhan pesat. Pada intinya, perkembangan yang telah ditempuh dan dicapai Jepang hingga kedudukannya saat ini melenyapkan tendensi Jepang untuk kembali mengikuti ambisi imperialisme di masa lalu, dan untuk menyusun kepentingan nasional yang dapat dicapai secara non konfrontatif dan lebih kooperatif. Sehingga ketika dihadapkan oleh kepentingan nasional dalam hal kelangkaan sumber daya dan penyusutan populasi, Jepang bertolak ke upaya-upaya kooperatif dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, kelangkaan sumber daya dalam pembangkitan energi listrik diatasi dengan pengembangan teknologi PLTN mutakhir. Di lain sisi, perekonomian Jepang yang telah beralih dari manufaktur produk murah menjadi produk berkualitas, berpotensi kuat untuk mengekspor dalam jumlah besar menuju kawasan yang sedang berkembang pesat, termasuk Asia Tenggara.

Selain pada ranah domestik, pasca Perang Dunia Kedua, hubungan Jepang berubah 180 derajat dengan Asia Tenggara. Dari yang awalnya negara dengan kebijakan luar negeri ekspansionis menjadi lebih bersahabat dengan wilayah Asia Tenggara. Pandangan baru dalam politik luar negeri ini tertuang dalam Doktrin Yoshida, yang memiliki fokus hubungan keamanan erat dengan Amerika Serikat (AS); fokus ke hubungan ekonomi; dan politik internasional yang *low profile*. Akibat doktrin ini, hingga tahun 1970-an, Jepang memiliki perjanjian ekonomi dengan banyak negara Asia Tenggara, utamanya dalam rangka reparasi kepada negara-negara korban agresi Jepang pada saat perang terdahulu. Program reparasi ini juga memberikan jalan terhadap ekspor komoditas Jepang di masa depan. Di era ini pula, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada 1967. Namun, doktrin ini mengalami tantangan luar biasa pada implementasinya menginjak tahun 1970-an. Hal ini disebabkan berbagai hal, seperti kecurigaan publik negara-negara Asia Tenggara terhadap peran Jepang dan perubahan kondisi geopolitik akibat membaiknya hubungan AS dan Tiongkok serta kekalahan AS pada Perang Vietnam (de Miguel, 2013).

Dalam rangka mengatasi hal ini, Doktrin Fukuda muncul pada 1977. Doktrin baru ini berfokus ke penolakan penggunaan militer dalam hubungannya dengan ASEAN; penggunaan

pendekatan ekonomi juga diikuti dengan sudut pandang yang lebih berbasis budaya; dan Jepang bersedia untuk menjembatani keretakan hubungan di Indochina. Akibat dari doktrin baru ini, hubungan Jepang dan ASEAN memasuki tahap yang lebih baru. Jepang menjadi pemberi *Foreign Direct Investment (FDI)* dan *Overseas Development Aid (ODA)* yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selain itu, terjadi integrasi ASEAN kepada sistem produksi perekonomian nasional Jepang. Dimana pekerjaan *hard labour* dan *low cost* (e.g. sektor industri tekstil) ditransferkan ke negara-negara ASEAN, sementara perekonomian domestik Jepang lebih difokuskan ke sektor industri yang lebih *capital intensive* dan *value added*-nya lebih tinggi (e.g. industri berat) (de Miguel, 2013).

Laiknya yang telah dibahas sebelumnya, kepentingan nasional dalam sudut pandang liberal mengutamakan kepentingan individu, dalam hal ini kepentingan individu dikontekstualkan dengan kepentingan Jepang sebagai aktor negara. Kebutuhan dalam level tertentu seperti keamanan regional, keamanan energi, kestabilan finansial antar regional tidak lagi dapat dipenuhi sendiri. Diperlukan Kerjasama lintas aktor negara maupun dalam ruang lingkup organisasi internasional untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Optimalisasi hubungan dengan negara lain yang dilandasi dengan prinsip oprinsip kesepahaman bersama, termasuk non intervensi oleh negara dalam politik domestik negara lain mutlak diperlukan. Selain itu, perdagangan bebas dengan instrumen pasar bebas berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan argumen utama dalam perspektif liberal. Hal ini diperkuat dengan fakta tentang stagnansi ekonomi yang dialami Jepang dalam dekade ini, khususnya kontraksi ekonomi dalam periode singkat, yang disebabkan oleh kejatuhan pasar saham Jepang dan diiringi oleh krisis moneter 1997. Harga produk keluaran Jepang meroket tinggi, ekspor menurun dan keadaan ekonomi stagnan. Luaran ekonomi yang tidak mengundang rasa aman dan stabil inilah yang mendorong Jepang untuk bergabung dengan ASEAN dan membentuk ASEAN+3, dengan beberapa kepentingan khusus seperti meningkatkan target pasar baru, mendapatkan tenaga kerja yang kompetitif dan meningkatkan posisi tawar dibandingkan dengan Tiongkok.

Kemudian, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa kita lihat bahwa sebelum pembentukan ASEAN+3, terjadi interdependensi ekonomi antara Jepang dengan negara-negara ASEAN. Kedua aktor politik ini memiliki hubungan yang bisa dikatakan *win-win solution* dari sudut pandang liberal. Karena Jepang bisa memfokuskan perekonomiannya ke industri yang lebih berfokus pada *capital intensive* dan *value added*-nya lebih tinggi, dengan demikian meningkatkan nilai *output* perekonomian nasional mereka. Sementara itu, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina mengalami industrialisasi yang mengubah *agrarian based economy* mereka menjadi *manufacturing based economy* walaupun tidak pada tahap secanggih Jepang, dan dengan demikian juga meningkatkan nilai *output* perekonomian nasional mereka.

Ketergantungan ekonomi inilah yang menjadi latar belakang berdirinya ASEAN+3. Pada saat Krisis Ekonomi 1997, ASEAN mengadakan diskusi dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dalam rangka mengatasi krisis tersebut. Hasil dari diskusi ini adalah berdirinya ASEAN+3 dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara ASEAN dengan tiga negara Asia Timur tersebut, terutama di bidang komunikasi, teknologi, energi, moneter, dan ekonomi secara umum (de Miguel, 2013; Kemenlu RI, 2018).

### Kesimpulan

Melalui analisa yang telah kami paparkan sebelumnya, pendekatan kepentingan nasional liberal memiliki dinamika yang kompleks pada peran Jepang di ASEAN+3. Kecenderungan interdependensi yang dilakukan oleh Jepang, merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional Jepang, bersama negara-negara anggota ASEAN. Kepentingan nasional dalam pendekatan liberal, semakin menjadi relevan dalam menggambarkan

hubungan Jepang dalam ASEAN+3. Melalui bantuan *foreign direct investment* yang diberikan kepada ASEAN, menjadikan hubungan Jepang terhadap organisasi ASEAN sebagai bentuk positif dari kepentingan nasional liberal, yang membawa peningkatan ekonomi.

Hubungan kedua pihak dalam hal ekonomi mencapai titik temu, dengan kepentingan nasional yang bergerak semakin konvergen. Jepang bermodalkan pengetahuan dan teknologi industri mutakhir, memerlukan pasar ekspor lebih sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional. Di sisi lain, negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan sekumpulan negara berkembang dengan ambisi menjadi pemain besar di Asia secara keseluruhan. Proses peralihan dari ekonomi agraris menuju industrialis membutuhkan transfer teknologi mutakhir. Pada akhirnya, Jepang bertolak menuju jalinan kerja sama dalam kerangka ASEAN+3 disebabkan oleh interdependensi atau saling ketergantungan yang erat. Jepang percaya dengan menjadi inisiator pengukuhan kebangkitan ekonomi pasca krisis ekonomi 1997, dapat membangkitkan kembali posisi Jepang sebagai pemain yang cukup dominan di kawasan Asia.

### **Referensi**

- Burchill, S. (2005). *Progressive Perspectives: Liberal Approaches*. In *The National Interest in International Relations Theory*. PALGRAVE MACMILLAN.
- de Miguel, E. (2013). JAPAN AND SOUTHEAST ASIA: FROM THE FUKUDA DOCTRINE TO ABE'S FIVE PRINCIPLE. UNISCI Discussion Papers, 99-116.
- Kemenlu RI. (2018). ASEAN Plus Three. Retrieved June 22, 2021, from Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN: [https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean\\_plus\\_three/978/etc-menu](https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean_plus_three/978/etc-menu)
- Masashi, N. (2003). Japan's Political and Security Relations with ASEAN. *Japan Center for International Exchange*, 154-167.
- Moravcsik, A., & Vachudova, M. A. (2003). National Interests, State Power, and EU Enlargement. *Center for European Studies Working Paper No. 97*.
- Rijal, N. K. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi. *Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2018): 159-179.